



PATTIRO

PUSAT TELAHAH DAN INFORMASI REGIONAL
(CENTER FOR REGIONAL INFORMATION AND STUDIES)

Menelusuri jejak ketertinggalan
**MENYUSUN LANGKAH BERSAMA
UNTUK PEMBANGUNAN RAJA AMPAT**



KERTAS POSISI

**Warung Kopi Aspirasi untuk Transparansi (WAPARASI)
Raja Ampat Terhadap Pembangunan Pendidikan Dasar
Di Kabupaten Raja Ampat.**

*Dipresentasikan pada Kegiatan Forum Kemitraan
Pemangku Kepentingan (FKPK) Kabupaten Raja Ampat*

Waisai, 3 September 2013



WAPARASI
Warung Kopi Aspirasi untuk Transparansi

Budget for all



PATTIRO

PUSAT TELAHAH DAN INFORMASI REGIONAL
(CENTER FOR REGIONAL INFORMATION AND STUDIES)

Warung Kopi
Aspirasi untuk Transparansi
(WAPARASI) Raja Ampat

KATA PENGANTAR

Sebagai sebuah proses formal pembuatan kebijakan negara, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah diatur oleh beberapa kebijakan negara dalam bentuk peraturan perundangan, antara lain UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketiga undang-undang tersebut di atas telah menjamin partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD; di mana, partisipasi aktif masyarakat itu berada di semua tahapan atau siklus APBD; mulai dari penyusunan, pembahasan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Selama ini, masih sangat kecil peluang formal masyarakat untuk terlibat aktif dalam semua tahapan siklus APBD; seperti disebutkan di atas. Partisipasi masyarakat, saat ini, baru sebatas pada proses perencanaannya saja atau yang biasa dikenal dengan istilah “Musrenbang”. Pada tahap pembahasan, apalagi pelaksanaan APBD, peluang masyarakat untuk terlibat secara langsung seringkali mendapat hambatan. Bahkan, masih banyak aparat pemerintah yang menganggap APBD itu sebagai “*dokumen rahasia*” sehingga proses penyusunan dan pelaksanaannya pun cenderung tertutup. Padahal, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), telah menyebutkan bahwa APBD adalah dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

Lebih jauh lagi, format anggaran yang tersedia selama ini pun seringkali tidak mudah dibaca oleh masyarakat. Hal itu menyebabkan masyarakat sulit untuk dapat memahami, apalagi mengomentari dokumen anggaran tersebut; sebagaimana yang banyak terjadi pada saat pemerintah melakukan dengar pendapat dengan publik mengenai anggaran. Akibatnya, banyak orang yang menjadi apatis dan tidak tertarik untuk memberikan masukan, selama proses anggaran berlangsung. Kondisi ini tentunya sangat disayangkan, mengingat keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran sangat penting, antara lain untuk meningkatkan perencanaan dan alokasi sumber daya, meningkatkan pengelolaan keuangan, dan memperkuat demokrasi.

Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten di Povinsi Papua. Sebagai daerah otonom baru yang masih berusia muda, Kabupaten Raja Ampat, di satu sisi, dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek; terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, dan kelembagaan. Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga tetap harus menunjukkan kinerjanya dalam mewujudkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kondisi keterbatasan dalam berbagai aspek sebagaimana disebutkan di atas, tentunya berdampak terhadap akses pendidikan penduduk Kabupaten Raja Ampat, yang umumnya tinggal



PATTIRO

PUSAT TELAHAH DAN INFORMASI REGIONAL
(CENTER FOR REGIONAL INFORMATION AND STUDIES)

Warung Kopi
Aspirasi untuk Transparansi
(WAPARASI) Raja Ampat

di pulau-pulau kecil dan terpencil. Meskipun, belakangan ini, cukup banyak warga Raja Ampat yang melanjutkan pendidikan hingga bangku perguruan tinggi, namun tingkat pendidikan sebagian besar penduduk berada pada level pendidikan dasar (Sekolah Dasar).

Data statistik *Raja Ampat Dalam Angka Tahun 2012* menyebutkan, bahwa di antara penduduk yang berusia 10 tahun ke atas (31.556 jiwa), 36,81% di antaranya hanya tamat SD, 18,83% tamat SMP, 9,63% tamat SMA, 2,84% tamat Perguruan Tinggi, dan sekitar 31,89% tidak memiliki ijazah. Ironis, memang, ketika pemerintah tengah berkonsentrasi mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun, di Kabupaten Raja Ampat masih terdapat sekitar 11.615 penduduk yang tingkat pendidikannya hanya sampai tamat SD; bahkan, yang tidak memiliki ijazah mencapai lebih dari 10.000 penduduk.

Dilaterbelakangi oleh kondisi pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, Kertas Posisi (Position Paper) ini disusun, sebagai wujud kepedulian dan partisipasi warga masyarakat sipil terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Raja Ampat; khususnya, pendidikan dasar. Penyusunan *paper* ini juga didasarkan pada hasil analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat tahun 2009 – 2013, dan dokumen-dokumen perencanaan dan pembangunan daerah lainnya.

Akhir kata, *“tak ada gading yang tak retak.”*

**Warung Kopi Aspirasi untuk Transparansi
“WAPARASI” Raja Ampat
Koordinator,**

Syaifuddin Wailata



PATTIRO

PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL
(CENTER FOR REGIONAL INFORMATION AND STUDIES)

Warung Kopi
Aspirasi untuk Transparansi
(WAPARASI) Raja Ampat

DAFTAR ISI

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang.	1
1.2.	Tujuan.	3

BAGIAN 2

GAMBARAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

2.1.	Geografis.	4
2.2.	Administratif.	4
2.3.	Demografi.	4
2.3.1.	Sebaran Penduduk Menurut Distrik, Jenis Kelamin, dan Sex Ratio.	5
2.3.2.	Sebaran Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin.	6
2.4.	Pemerintahan.	6
2.5.	Visi dan Misi.	
2.5.1.	Visi.	8
2.5.2.	Misi.	8

BAGIAN 3

POTRET URUSAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN RAJA AMPAT

3.1.	Permasalahan Pembangunan Pendidikan.	9
3.2.	Kebijakan Pembangunan Pendidikan.	9
3.3.	Kebijakan Anggaran Pendidikan Tahun 2006 - 2010.	9
3.4.	Capaian Pembangunan Pendidikan.	
3.4.1.	Rasio Murid terhadap Sekolah.	11
3.4.2.	Rasio Murid terhadap Guru.	12
3.4.3.	Angka Melek Huruf (AMH).	13
3.4.4.	Angka Partisipasi Sekolah (APS).	13



- 3.4.5. Angka Partisipasi Kasar (APK). 14
- 3.4.6. Angka Partisipasi Murni (APM). 14

BAGIAN 4
POTRET ANGGARAN PENDIDIKAN
KABUPATEN RAJA AMPAT

- 4.1. Potret Umum Anggaran. 16
 - 4.1.1. Trend Total Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 16
 - 4.1.2. Trend Komponen Pendapatan Daerah. 17
 - 4.1.3. Trend Komponen Belanja Daerah. 19
 - 4.1.4. Trend Komponen Belanja Tidak Langsung. 20
 - 4.1.5. Trend Komponen Belanja Langsung. 21
 - 4.1.6. Trend Belanja Berdasarkan Urusan. 22
- 4.2. Potret Anggaran Pendidikan Tahun 2012 - 2013. 24
 - 4.2.1. Trend Total Pendapatan dan Belanja Pendidikan. 24
 - 4.2.2. Trend Belanja Program. 25
 - 4.2.3. Analisis. 28

BAGIAN 5
PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan. 31
- 5.2. Sikap dan Posisi WAPARASI Raja Ampat. 33
- 5.3. Rekomendasi. 33

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pendidikan adalah agenda penting negara yang menjadi kunci suksesnya pembangunan. Pendidikan juga merupakan instrumen pembangunan sosial ekonomi, yang menjadi dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menyadari peran penting dan strategisnya pendidikan, maka selayaknya pendidikan dijadikan prioritas utama pembangunan; baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, yang konsekuensinya adalah berbagai urusan diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka urusan pendidikan menjadi urusan yang strategis bagi pemerintah daerah. Terdapat 3 (tiga) alasan utama sehingga pendidikan menjadi urusan yang strategis bagi pemerintah daerah, yaitu: (i) pendidikan adalah jasa publik dan menggunakan anggaran publik yang menyedot perhatian masyarakat luas; (ii) pendidikan adalah sektor yang melibatkan banyak pegawai (high labor intensive); dan konsekuensi dari kedua hal tersebut di atas, (iii) pendidikan juga menyerap anggaran yang sangat besar.

Amandemen Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dipertegas melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah mengamanatkan bahwa dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk lebih memperjelas kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan itu pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan peraturan tersebut, urusan pendidikan menjadi salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten/ kota; terutama, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non-formal dan Informal.

Pendidikan dasar, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainnya yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lainnya yang sederajat. Jadi, pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang lamanya 9 (Sembilan) tahun; 6 (enam) tahun di SD/ MI dan 3 (tiga) tahun di SMP/ MTs. Tujuan pendidikan dasar adalah mengajarkan kecakapan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung, yang merupakan penunjang utama pengajaran pada jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan demikian, melalui Undang-Undang ini hak untuk memperoleh pendidikan dasar, yang semula hanya sampai tamat Sekolah Dasar (SD), ditingkatkan menjadi tamat SD dan SMP.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf pendidikan seluruh warga negara Indonesia adalah dengan mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJARDIKDAS) 9 Tahun. Program ini menargetkan semua warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal setara SMP dengan mutu yang baik.

Secara lebih mendalam, Program WAJARDIKDAS 9 Tahun diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Menurut pasal 1 peraturan ini, yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Fungsi wajib belajar, berdasarkan pasal 2 peraturan ini, adalah untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (universal basic education), yang pada hakekatnya, berarti penyediaan akses terhadap pendidikan yang sama untuk semua anak. Hal ini sejalan dengan kaidah yang tercantum dalam Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak (Prayitno, 2000).

Melalui Program WAJARDIKDAS 9 tahun, diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi; baik ke lembaga pendidikan sekolah atau pun luar sekolah. Dengan wajib belajar, diharapkan mereka dapat menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten di Povinsi Papua. Sebagai daerah otonom baru yang masih berusia muda, Kabupaten Raja Ampat, di satu sisi, dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek; terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, dan kelembagaan. Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga tetap harus menunjukkan kinerjanya dalam mewujudkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kondisi keterbatasan dalam berbagai aspek sebagaimana disebutkan di atas, tentunya berdampak terhadap akses pendidikan penduduk Kabupaten Raja Ampat, yang umumnya tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil. Meskipun, belakangan ini, cukup banyak warga Raja Ampat yang melanjutkan pendidikan hingga bangku perguruan tinggi, namun **“tingkat pendidikan sebagian besar penduduk berada pada level pendidikan dasar (Sekolah Dasar).”**

Data statistik *Raja Ampat Dalam Angka Tahun 2012* menyebutkan, bahwa di antara penduduk yang berusia 10 tahun ke atas (31.556 jiwa), 36,81% di antaranya hanya tamat SD, 18,83% tamat SMP, 9,63% tamat SMA, 2,84% tamat Perguruan Tinggi, dan sekitar 31,89% tidak memiliki ijazah (lihat tabel 1.1).

Ironis, memang, ketika pemerintah tengah berkonsentrasi mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun, di Kabupaten Raja Ampat masih terdapat sekitar 11.615 penduduk yang tingkat pendidikannya hanya sampai tamat SD; bahkan, yang tidak memiliki ijazah mencapai lebih dari 10.000 penduduk.

Dilaterbelakangi oleh kondisi pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, Kertas Posisi (Position Paper) ini disusun, sebagai wujud kepedulian dan partisipasi warga masyarakat sipil terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Raja Ampat; khususnya, pendidikan dasar.

Tabel 1.1. Persentase Penduduk Kabupaten Raja Ampat Berusia 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Terakhir Tahun 2011

Tahun	Tidak mempunyai Ijazah	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
2008	28,89	45,08	15,54	9,05	1,44	100,00
2009	33,74	30,17	22,23	11,20	1,64	100,00
2010	33,07	35,45	13,04	12,56	5,88	100,00
2011	31,89	36,81	18,83	9,63	2,84	100,00

Sumber : Kabupaten Raja Ampat dalam Angka Tahun 2012.

Penyusunan *paper* ini juga didasarkan pada hasil analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat tahun 2009 – 2013, dan dokumen-dokumen perencanaan dan pembangunan daerah lainnya.¹

1.2. Tujuan.

Adapun tujuan penyusunan *Kertas Posisi (Position Paper)* ini, antara lain:

- Membantu Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Raja Ampat; khususnya, pendidikan dasar; dan
- Mengusulkan rencana program, sebagai alternatif penyelesaian permasalahan/ isu strategis yang terkait dengan *rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Raja Ampat*.

¹ Analisis APBD ini dilakukan oleh Jaringan CSO “WAPARASI” (Warung Kopi Aspirasi untuk Transparansi) Raja Ampat, difasilitasi oleh PATTIRO melalui *Program Support to CSO* yang didukung AIPD, pada tanggal 6 Agustus 2013.



PATTIRO

PUSAT TELAHAH DAN INFORMASI REGIONAL
(CENTER FOR REGIONAL INFORMATION AND STUDIES)

Warung Kopi
Aspirasi untuk Transparansi
(WAPARASI) Raja Ampat

BAGIAN 2

GAMBARAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

2.1. Geografis.

Secara geografis, letak Kabupaten Raja Ampat berada di bagian paling Barat Pulau Papua, di antara koordinat 30°33" Lintang Utara – 01°00" Lintang Selatan, dan 124°30" – 131°30" Bujur Timur.

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Raja Ampat memiliki kurang-lebih 610 pulau besar dan kecil, dengan panjang garis pantai kurang-lebih 753 Km. Sementara ini, baru sekitar 34 pulau saja yang berpenghuni. Ditinjau dari segi luasnya, pulau-pulau di Kabupaten Raja Ampat memiliki luas yang bervariasi. Terdapat 4 (empat) buah pulau besar, yaitu : (1) Pulau Waigeo, (2) Pulau Batanta, (3) Pulau Salawati, dan (4) Pulau Misool.

2.2. Administratif.

Secara administratif, Kabupaten Raja Ampat termasuk dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Papua Barat, dengan Pusat Pemerintahan di **Waisai**.

Luas wilayah Kabupaten Raja Ampat adalah kurang-lebih **8.034,440 Km²**, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Halmahaera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
Sebelah timur : berbatasan dengan Kota Sorong;
Sebelah utara : berbatasan dengan Republik Federal Palau dan Samudera Pasifik; dan
Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Seram Utara, Provinsi Maluku.

Awalnya, Kabupaten Raja Ampat hanya terdiri dari 10 kecamatan/ distrik, yaitu : (1) Distrik Waigeo Utara; (2) Distrik Waigeo Selatan; (3) Distrik Misool; (4) Distrik Samate; (5) Distrik Misool Timur; (6) Distrik Misool Barat; (7) Distrik Misool Selatan; (8) Distrik Waigeo Barat; (9)

Distrik Ayau; dan (10) Distrik Teluk Mayalibit. Sejak tahun 2010, jumlah tersebut dimekarkan menjadi sebanyak 24 wilayah distrik, 117 kampung, dan 4 kelurahan (lihat tabel 2.1).

Distrik terluas di Kabupaten Raja Ampat adalah Distrik Waigeo Barat, dengan luas wilayah mencapai 1.669,843 Km² (20,78%). Kemudian, disusul oleh Distrik Waigeo Barat Kepulauan (11,69%), Distrik Kofiau (10,52%), dan Distrik Misool Selatan (7,71%). Sedangkan, distrik dengan luas wilayah terkecil adalah Distrik Kota Waisai, yang luas wilayahnya hanya sekitar 54,841 Km² (0,68%).

2.3. Demografi.

Jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2011 adalah sebanyak **43.435 jiwa**, terdiri dari laki-laki 23.142 jiwa (53,3%) dan perempuan 20.293 jiwa (46,7%), dengan nilai sex ratio sebesar 114,04.

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Raja Ampat

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(h)
1	Misool Selatan	Yellu	619,445	7,71	5
2	Misool Barat	Lilinta	268,206	3,34	5
3	Missol	Salafen	420,853	5,24	5
4	Kofiau	Deer	845,065	10,52	5
5	Misool Timur	Folley	532,341	6,63	6
6	Kep. Sembilan	Weijim Barat	163,665	2,04	4
7	Salawati Utara	Samate	240,946	3,00	6
8	Salawati Tengah	Kalobo	160,631	2,00	7
9	Salawati Barat	Wayom	133,859	1,67	4
10	Batanta Selatan	Yenanas	205,250	2,55	4
11	Batanta Utara	Yensawai Timur	250,861	3,12	4
12	Waigeo Selatan	Saonek	310,763	3,87	5
13	Kota Waisai	Waisai	54,841	0,68	4
14	Teluk Mayalibit	Warsambin	106,808	1,33	4
15	Tiplol Mayalibit	Go	167,059	2,08	6
16	Meosmansar	Yenbekwan	224,081	2,79	9
17	Waigeo Barat	Waisilip	1.669,843	20,78	5
18	Waigeo Barat Kepulauan	Manyaifun	939,287	11,69	6
19	Waigeo Utara	Kabare	95,150	1,18	6
20	Warbomi	Wawarnai	61,672	0,77	4
21	Supnin	Rauki	63,434	0,79	4
22	Kepulauan Ayau	Abidon	135,613	1,69	4



23	Ayau	Dorehkar	203,419	2,53	5
24	Waigeo Timur	Urbinasopen	161,349	2,01	4
Jumlah/ Total			8.034,440	100,00	121

Sumber: Kabupaten Raja Ampat dalam Angka Tahun 2012.

2.3.1. Sebaran Penduduk Menurut Distrik, Jenis Kelamin, dan Sex Ratio.

Berdasarkan distrik, jenis kelamin, dan sex ratio, sebaran penduduk Kabupaten Raja Ampat menunjukkan bahwa distrik dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Distrik Kota Waisai, yang jumlah penduduknya mencapai 7.477 jiwa (17,2%), terdiri dari laki-laki sebanyak 4.169 jiwa dan perempuan 3.308 jiwa, dengan nilai sex ratio: 126,03.

Sedangkan, distrik dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Distrik Teluk Mayalibit, yang jumlah penduduknya hanya sekitar 855 jiwa (1,96%), terdiri dari laki-laki sebanyak 447 jiwa dan perempuan 408 jiwa, dengan nilai sex ratio: 109,56 (lihat tabel 2.2).

Tabel 2.2. Sebaran Penduduk Kabupaten Raja Ampat Menurut Distrik, Jenis Kelamin, dan Sex Ratio

No.	Distrik	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin		Sex Ratio
			Laki-laki	Perempuan	
(a)	(b)		(c)	(d)	(f)
1	Misool Selatan	3.120	1.640	1.480	110,81
2	Misool Barat	1.289	676	613	110,28
3	Missol	1.752	933	819	113,92
4	Kofiau	2.537	1.338	1.199	111,59
5	Misool Timur	2.704	1.488	1.216	122,37
6	Kep. Sembilan	1.506	763	743	102,69
7	Salawati Utara	2.140	1.116	1.024	108,98
8	Salawati Tengah	1.914	1.029	885	116,27
9	Salawati Barat	898	475	423	112,29
10	Batanta Selatan	1.324	705	619	113,89
11	Batanta Utara	917	493	424	116,27
12	Waigeo Selatan	1.838	956	882	108,39
13	Kota Waisai	7.477	4.169	3.308	126,03
14	Teluk Mayalibit	855	447	408	109,56
15	Tiplol Mayalibit	941	495	446	110,99
16	Meosmansar	1.644	852	792	107,58
17	Waigeo Barat	1.434	780	654	119,27
18	Waigeo Barat Kepulauan	2.090	1.095	995	110,05
19	Waigeo Utara	1.492	793	699	113,45
20	Warbomi	1.045	550	495	111,11
21	Supnin	918	486	432	112,50



22	Kepulauan Ayau	983	500	483	103,52
23	Ayau	1.223	632	591	106,94
24	Waigeo Timur	1.394	731	663	110,26
Jumlah/ total		43.435	23.142	20.293	114,04

Sumber : Kabupaten Raja Ampat dalam Angka Tahun 2012.

2.3.2. Sebaran Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin.

Sementara, berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin, sebaran penduduk Kabupaten Raja Ampat menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada golongan umur 0 – 4 tahun (BALITA), yaitu mencapai 6.287 jiwa (14,4%), terdiri dari laki-laki 3.274 jiwa dan perempuan 3.023 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk paling sedikit berada pada golongan umur di atas 75 tahun, yaitu sebanyak 172 jiwa (0,4%), terdiri dari laki-laki 94 jiwa dan perempuan 78 jiwa (lihat tabel 2.3).

2.4. Pemerintahan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 kabupaten di Povinsi Papua.

Tabel 2.3. Sebaran Penduduk Kabupaten Raja Ampat Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

Golongan umur	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(a)	(b)	(c)	(d)
0 – 4	3.264	3.023	6.287
5 – 9	2.928	2.664	5.592
10 – 14	2.319	2.112	4.431
15 – 19	1.966	1.845	3.811
20 – 24	2.079	1.933	4.012
25 – 29	2.600	2.200	4.800
30 – 34	1.984	1.754	3.738
35 – 39	1.556	1.273	2.829
40 – 44	1.184	1.006	2.190
45 – 49	1.106	886	1.992
50 – 54	823	619	1.442
55 – 59	565	407	972
60 – 64	346	260	606
65 – 69	200	155	355
70 – 74	127	80	207
75 +	94	78	172
Jumlah/ total	23.142	20.293	43.435



Sumber : Kabupaten Raja Ampat dalam Angka Tahun 2012.

Diterbitkannya Undang-Undang tersebut dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan juga sebagai bagian dari substansi pelaksanaan Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Saat ini, Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dipimpin oleh pasangan **Drs. Marcus Wanma, M.Si.** dan **Drs Inda Arfan**, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat periode tahun 2011-2015, yang terpilih kembali, setelah menjabat pada periode sebelumnya, tahun 2005-2010.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memiliki beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), 16 Dinas Otonom, 6 Badan Daerah, 4 Kantor Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Inspektorat, dan 24 distrik/kecamatan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat adalah sebanyak 2.388 orang, terdiri dari laki-laki 1.506 orang (63,0%) dan perempuan 882 orang (37,0%). Distribusi PNS menunjukkan bahwa SKPD Dinas Pendidikan adalah unit kerja dengan jumlah pegawai terbanyak, yaitu berjumlah 875 orang (36,6%), terdiri dari laki-laki 515 orang dan perempuan 360 orang. Dari sebanyak 875 orang PNS di lingkungan SKPD Dinas Pendidikan tersebut, 86,2% di antaranya adalah mereka yang menduduki jabatan fungsional, sedangkan 13,8% lainnya berada pada jabatan struktural.

Sementara, dari sisi pendidikan, hampir sebagian (40,7%) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sedangkan, yang berpendidikan SLTA ke atas, masing-masing, sebanyak 10,5% Diploma II, 13,2% Diploma III, dan sekitar 32,3% berpendidikan D.IV/ S.1/ S.2.

2.5. Visi dan Misi.

2.5.1. Visi.

Visi merupakan cita-cita atau kondisi yang ingin diwujudkan dalam suatu rentang waktu tertentu. Visi Kabupaten Raja Ampat untuk Tahun 2011 – 2015 adalah :

***“Mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari
Menuju Masyarakat yang Sehat, Berpendidikan,
Sejahtera, dan Berkeadilan.”***

Visi di atas merupakan hasil lanjutan dari ‘Semangat Tomolol’ yang dideklarasikan oleh pejabat Bupati Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 13 Desember 2003. Semangat Tomolol merupakan



semangat yang menjadi hasil pertemuan para pemangku kepentingan di Kabupaten Raja Ampat, dan merupakan itikad baik dari semua pihak untuk berpartisipasi secara terbuka dalam menetapkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan di Kabupaten Raja Ampat; sekaligus merancang program pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terdapat 5 (lima) kata kunci penting yang terkandung dalam rumusan visi Kabupaten Raja Ampat, yaitu:

- a. **Bahari.** Berkembangnya nilai-nilai dasar dalam berbagai dimensi kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang menempatkan laut sebagai sumber kehidupan.
- b. **Sehat.** Terwujudnya kondisi di mana tingkat kesehatan fisik maupun spiritual masyarakat Raja Ampat semakin membaik yang didorong oleh ketersediaan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan.
- c. **Berpendidikan.** Kondisi di mana tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Raja Ampat semakin meningkat yang didukung oleh ketersediaan dan kemudahan akses fasilitas pendidikan.
- d. **Sejahtera.** Merujuk pada terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terutama berupa kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peluang berusaha yang ditopang oleh ketersediaan infrastruktur dasar secara memadai.
- e. **Berkeadilan.** Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Raja Ampat.

2.5.2. Misi.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan Kabupaten Raja Ampat untuk tahun 2011 – 2015, sebagai berikut:

1. Mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat;
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif; dan
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi bahari dan sumberdaya lainnya.



BAGIAN 3

POTRET URUSAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN RAJA AMPAT

3.1. Permasalahan Pembangunan Pendidikan.

Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 – 2015, disebutkan bahwa permasalahan utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Raja Ampat adalah menyangkut **sarana-prasarana fisik dan tenaga pengajar**.

Bangunan SD dan SMP, memang, telah tersedia hampir di semua distrik. Namun demikian, kondisi fisik dari hampir sebagian besar sarana pendidikan yang ada itu cukup memprihatinkan karena banyak di antaranya yang sudah rusak. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), sementara ini, hanya terdapat di beberapa distrik saja. Dengan kondisi ini, biasanya warga harus menyekolahkan anak mereka ke luar wilayah Kabupaten Raja Ampat, seperti ke Kota Sorong. Keterbatasan ruang kelas telah menyebabkan banyak sekolah yang terpaksa harus menggunakan satu ruang kelas untuk dua aktivitas belajar dari tingkat kelas yang berbeda secara bersamaan; bahkan, keterbatasan sarana fisik ini juga telah menyebabkan banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi.

Di samping masalah keterbatasan sarana dan prasarana fisik, Kabupaten Raja Ampat juga menghadapi kendala dalam hal ketersediaan tenaga pengajar. Keterbatasan tenaga pengajar di sini, tidak hanya karena jumlah guru yang terbatas, akan tetapi menyangkut relatif masih rendahnya komitmen dari sebagian guru yang ada di daerah ini. Banyak tenaga pengajar yang sering meninggalkan tugas karena tidak bersedia menetap di tempat tugasnya atau sering pergi ke kota dalam waktu yang cukup lama. Dengan kondisi ini, tidak sedikit guru yang terpaksa harus mengajar melebihi beban tugas yang sebenarnya; seperti mengajar di lebih dari satu kelas pada waktu yang bersamaan atau mengelola siswa yang jumlahnya melebihi batas kewajaran.

3.2. Kebijakan Pembangunan Pendidikan.

Guna mengatasi permasalahan pembangunan pendidikan di atas, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, pada periode tahun 2006 – 2010, telah menetapkan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai berikut :

- a. Penambahan jumlah tenaga pengajar,
- b. Penambahan jumlah ruang kelas, dan
- c. Pembangunan gedung sekolah baru.

3.3. Kebijakan Anggaran Pendidikan Tahun 2006 - 2010.

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan pembangunan pendidikan tersebut di atas, sejak tahun 2006 – 2010, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 166.383.902.035,- untuk sektor pendidikan; di mana, alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk pembangunan gedung sekolah dan rumah guru, mess pendidikan, pengadaan meubelair sekolah, buku-buku pelajaran, pengembangan SMA unggulan, dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga pendidik (lihat tabel 3.1).

Tabel 3.1 Jumlah Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006 – 2010

No	Tahun	Alokasi anggaran
(a)	(b)	(c)
1	2006	23.630.891.000
2	2007	29.018.289.710
3	2008	47.883.848.500
4	2009	48.260.872.825
5	2010	17.890.000.000
Jumlah		166.383.902.035

Sumber : RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 - 2015

3.4. Capaian Pembangunan Pendidikan.

Hingga tahun 2011, jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Raja Ampat menunjukkan data sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Jumlah Sekolah, Ruangan, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah	Ruang		Guru	Murid
			Belajar	Perpustakaan		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Taman Kanak-kanak	12	16	-	49	304
2	Sekolah Dasar	97	432	1	378	10.154
4	Sekolah Menengah Pertama	31	99	6	174	2.280
5	Sekolah Menengah Atas	12	58	1	117	1.172
6	Sekolah Menengah Kejuruan	2	6	1	36	196



7	Kursus-kursus	-	-	-	-	-
---	---------------	---	---	---	---	---

Sumber : Kabupaten Raja Ampat dalam Angka Tahun 2012.

Pada tingkat pendidikan **SD**, terdapat sebanyak **97 unit sekolah, 432 ruang belajar, 1 ruang perpustakaan, 378 orang guru**, dengan jumlah murid sebanyak **10.154 siswa**.

Sedangkan, pada jenjang pendidikan **SMP**, terdapat sebanyak **31 unit sekolah, 99 ruang belajar, 6 ruang perpustakaan, 174 orang guru**, dengan jumlah murid sebanyak **2.280 siswa**.

3.4.1. Rasio Murid terhadap Sekolah.

Rasio murid terhadap sekolah menunjukkan pola semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin banyak murid yang harus ditampung. Pada jenjang pendidikan **SD**, rasio murid terhadap sekolah menunjukkan angka **104,7**; artinya, rata-rata jumlah murid di setiap SD di Kabupaten Raja Ampat adalah sebanyak 104-105 siswa. Bila diasumsikan bahwa setiap sekolah memiliki sedikitnya 6 ruang belajar, maka setiap ruangan menampung sebanyak 17-18 siswa.

Sedangkan, pada jenjang pendidikan **SMP**, angka rasio murid terhadap sekolah sebesar **73,5**; artinya, rata-rata jumlah murid di setiap SMP di Kabupaten Raja Ampat adalah sebanyak 73-74 siswa. Bila dirata-ratakan bahwa setiap sekolah memiliki sedikitnya 3 ruang belajar, maka setiap ruangan menampung sebanyak 24-25 siswa.

Tabel 3.3. Jumlah Sekolah Dasar, Guru, Murid, dan Rasio Murid Dirinci Menurut Distrik Tahun 2011

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid Terhadap	
					Sekolah	Guru
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Misool Selatan	5	15	699	139,8	46,6
2	Misool Barat	5	7	442	88,4	63,1
3	Missol	5	17	435	87,0	25,6
4	Kofiau	4	14	822	205,5	58,7
5	Misool Timur	5	12	495	99,0	41,3
6	Kep. Sembilan	3	7	372	124,0	53,1
7	Salawati Utara	4	26	488	122,0	18,8
8	Salawati Tengah	4	31	249	62,3	8,0
9	Salawati Barat	3	8	208	69,3	26,0
10	Batanta Selatan	4	10	362	90,5	36,2
11	Batanta Utara	2	7	225	112,5	32,1

12	Waigeo Selatan	5	24	467	93,4	19,5
13	Kota Waisai	3	42	864	288,0	20,6
14	Teluk Mayalibit	4	14	303	75,8	21,6
15	Tiplol Mayalibit	6	12	191	31,8	15,9
16	Meosmansar	7	25	455	65,0	18,2
17	Waigeo Barat	5	13	410	82,0	31,5
18	Waigeo Barat Kep.	5	25	578	115,6	23,1
19	Waigeo Utara	3	15	329	109,7	21,9
20	Warbomi	4	10	317	79,3	31,7
21	Supnin	2	8	189	94,5	23,6
22	Kepulauan Ayau	3	11	409	136,3	37,2
23	Ayau	2	8	380	190,0	47,5
24	Waigeo Timur	4	17	465	116,3	27,4
	Jumlah / Total	97	378	10.154	104,7	26,9

Sumber : Kabupaten Raja Ampat dalam Angka Tahun 2012.

3.4.2. Rasio Murid terhadap Guru.

Rasio murid terhadap guru menggambarkan jumlah beban guru dalam mengajar sejumlah murid. Pada jenjang pendidikan **SD**, rasio murid terhadap guru adalah sebesar **26,9**; artinya, untuk satu orang guru SD di Kabupaten Raja Ampat, rata-rata mengajar sebanyak 26-27 siswa.

Sedangkan, pada jenjang pendidikan **SMP**, rasio murid terhadap guru menunjukkan angka **13,1**; artinya, untuk satu orang guru SMP di Kabupaten Raja Ampat rata-rata mengajar sebanyak 13-14 siswa.

Tabel 3.4 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Guru, Murid, dan Rasio Murid Dirinci Menurut Distrik Tahun 2011

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid Terhadap	
					Sekolah	Guru
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Misool Selatan	2	10	172	86	17,2
2	Misool Barat	2	1	39	19,5	39,0
3	Missol	1	10	173	173	17,3
4	Kofiau	2	9	137	68,5	15,2
5	Misool Timur	1	3	97	97	32,3
6	Kep. Sembilan	1	3	79	79	26,3
7	Salawati Utara	2	18	100	50	5,6

8	Salawati Tengah	1	14	91	91	6,5
9	Salawati Barat	1	-	-	-	-
10	Batanta Selatan	1	4	91	91	22,8
11	Batanta Utara	1	3	66	66	22,0
12	Waigeo Selatan	1	9	89	89	9,9
13	Kota Waisai	2	36	426	213	11,8
14	Teluk Mayalibit	1	7	76	76	10,9
15	Tiplol Mayalibit	1	-	-	-	-
16	Meosmansar	1	4	59	59	14,8
17	Waigeo Barat	2	7	73	36,5	10,4
18	Waigeo Barat Kep.	2	10	148	74	14,8
19	Waigeo Utara	2	9	111	55,5	12,3
20	Warbomi	1	5	76	76	15,2
21	Supnin	-	-	-	-	-
22	Kepulauan Ayau	1	-	-	-	-
23	Ayau	1	7	119	119	17,0
24	Waigeo Timur	1	5	58	58	11,6
Jumlah / Total		31	174	2.280	73,5	13,1

Sumber : Kabupaten Raja Ampat dalam Angka Tahun 2012.

3.4.3. Angka Melek Huruf (AMH).

Angka Melek huruf menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis dengan total jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas.

Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Raja Ampat menunjukkan data sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan jenis Kelamin Tahun 2011

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Melek Huruf	Buta Huruf	Melek Huruf	Buta Huruf	Melek Huruf	Buta Huruf
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
2008	93,06	6,94	91,96	8,04	92,54	7,46
2009	77,02	22,98	79,16	20,84	87,09	22,01
2010	95,43	4,57	92,99	7,01	94,28	5,72

2011	95,54	4,46	92,32	7,68	93,98	6,02
------	-------	------	-------	------	-------	------

Sumber : Kabupaten Raja Ampat dalam Angka Tahun 2012.

AMH di Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan dari sebanyak 94,28% pada tahun 2010, menjadi 93,98% pada tahun 2011. Dengan demikian, otomatis terjadi peningkatan jumlah penduduk buta huruf, dari sebanyak 5,72% pada tahun 2010, menjadi 6,02% pada tahun 2011.

Artinya, *di antara penduduk Kabupaten Raja Ampat yang berusia 10 tahun ke atas (31.556 jiwa), terdapat sekitar 6,02% atau sebanyak 1.899 penduduk buta huruf.*

3.4.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengetahui seberapa besar penduduk pada kelompok usia tertentu telah berpartisipasi menempuh pendidikan melalui sekolah-sekolah yang telah disediakan oleh pemerintah maupun swasta.

**Tabel 3.6. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)
7 - 12 Tahun	92,71	92,41	92,56
13 - 15 Tahun	90,86	86,43	89,37
16 - 18 tahun	60,83	54,19	57,78

Sumber : Kabupaten Raja Ampat dalam Angka Tahun 2012.

APS di Kabupaten Raja Ampat menunjukkan pola semakin tinggi jenjang pendidikan, maka APS semakin menurun. APS pada kelompok umur **7-12 tahun** adalah sebesar **92,56%**. Kemudian, pada kelompok umur **13-15 tahun**, APS menurun menjadi **89,37%**. Lalu, pada kelompok umur **16-18 tahun**, APS lebih jauh lagi menurun menjadi **57,78%**.

Semakin rendahnya APS tersebut di atas menunjukkan fakta bahwa *“semakin tinggi kelompok usia sekolah, maka semakin tinggi pula angka putus sekolah pada kelompok usia sekolah tersebut.”*

3.4.5. Angka Partisipasi Kasar (APK).

Tabel 3.7. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)
SD	115,50	113,11	114,33
SMP	76,85	77,70	77,14
SMU	57,27	66,71	61,61

Sumber : Kabupaten Raja Ampat dalam Angka Tahun 2012.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat pendidikan **SD** di Kabupaten Raja Ampat mencapai **115,50%**; artinya, masih terdapat sekitar 15,50% murid SD di Kabupaten Raja Ampat yang berada diluar batas kelompok umur 7 - 12 tahun; baik itu kurang dari 7 tahun maupun di atas 12 tahun. Untuk kasus di Kabupaten Raja Ampat, diduga lebih banyak penduduk yang menempuh pendidikan SD di atas kelompok usia 7 - 12 tahun.

3.4.6. Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang menunjukkan persentase penduduk yang bersekolah tepat pada kelompok umur yang sesuai.

**Tabel 3.8. Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011**

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)
SD	85,41	88,59	86,97
SMP	41,87	31,95	38,54
SMU	35,70	29,31	32,77

Sumber : Kabupaten Raja Ampat dalam Angka Tahun 2012.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat pendidikan SD di Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar **86,97%**. Artinya, **masih terdapat sekitar 13,03% penduduk berusia sekolah SD (7-12 tahun) yang sedang tidak bersekolah.**

Pada APM dan APK di atas terlihat bahwa pada jenjang pendidikan SD memiliki persentase yang cukup tinggi. Namun, begitu memasuki jenjang pendidikan SMP, nilai tersebut anjlok dengan sangat tajam. Hal ini sejalan dengan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Raja Ampat, yang hanya berada pada angka **8,06** tahun atau rata-rata penduduk putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP kelas 2.

BAGIAN 4

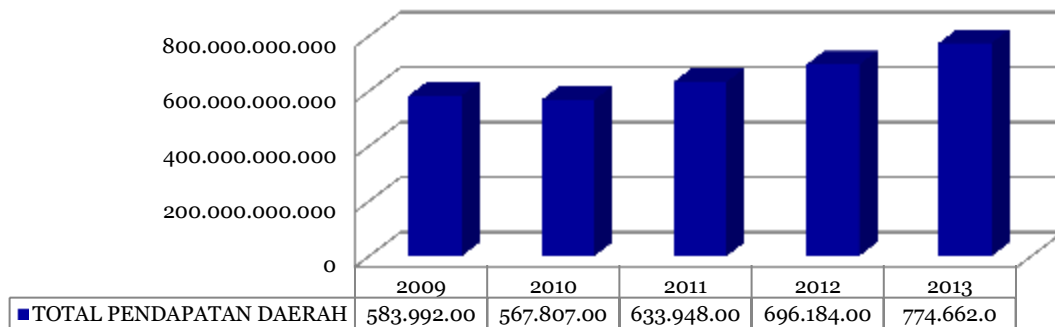
POTRET ANGGARAN PENDIDIKAN KABUPATEN RAJA AMPAT

4.1. Potret Umum Anggaran.

4.1.1. Trend Total Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2009 – 2013), trend total pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif; sebagaimana yang terlihat pada grafik 4.1 berikut :

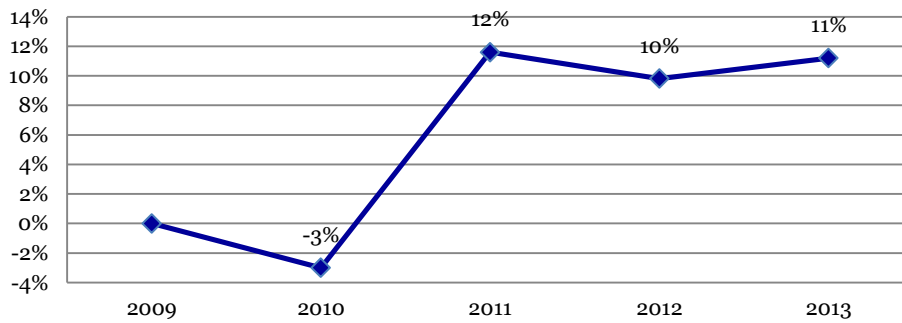
Grafik4.1. Trend Total Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 - 2013



Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

Pada tahun 2009, total pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar Rp 583,992 juta. Kemudian, mengalami penurunan sekitar 3,0%, pada tahun 2010, menjadi Rp 567,807 juta. Di tahun 2011, total pendapatan daerah itu mengalami pertumbuhan yang significant sebesar 12,0%, menjadi Rp 633,948 juta. Dan, dalam dua tahun terakhir, juga mengalami kenaikan, meskipun dengan nilai pertumbuhan yang lebih kecil, dibanding tahun 2011; yaitu sebesar 10,0% pada tahun 2012, dan 11,0% pada tahun 2013, menjadi Rp 774,662 juta (lihat grafik 4.2).

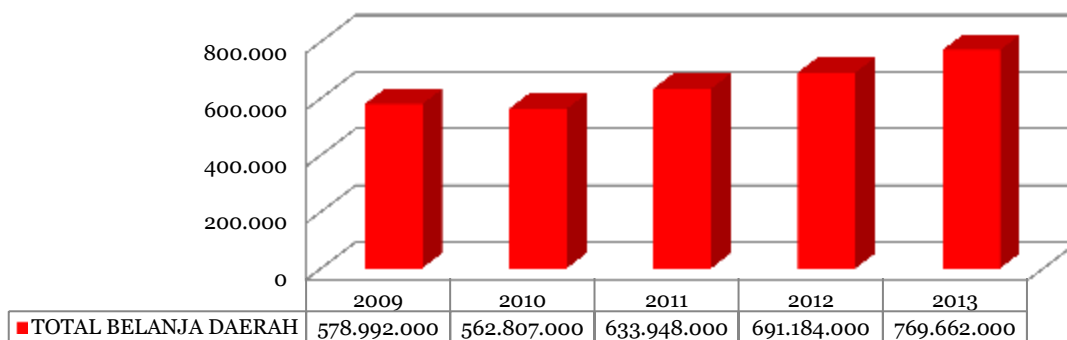
Grafik 4.2. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 - 2013



Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

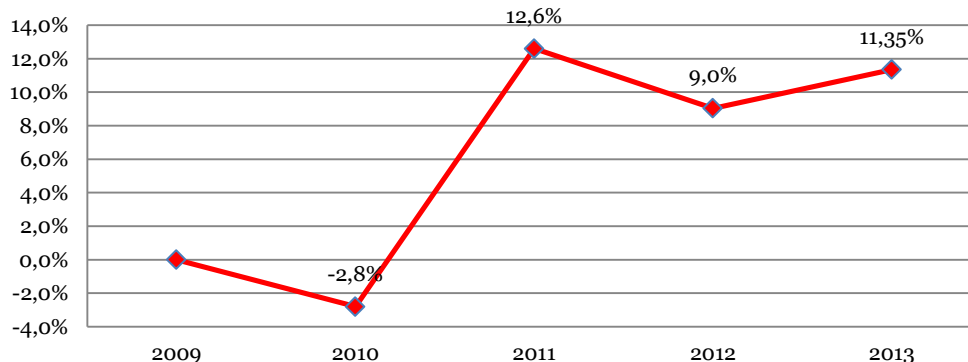
Serupa dengan total pendapatan, trend total belanja daerah Kabupaten Raja Ampat juga menunjukkan pergerakan yang fluktuatif (lihat grafik 4.3). Pada tahun 2009, total belanja daerah Kabupaten Raja Ampat mencapai Rp 578,992 juta. Kemudian, mengalami penurunan sekitar 2,8%, pada tahun 2010, menjadi Rp 562,807 juta. Di tahun 2011, total belanja daerah tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,6%, menjadi Rp 633,948 juta. Tahun 2012, juga mengalami kenaikan sekitar 9,0%, dan pada tahun 2013, kembali mengalami kenaikan sebesar 11,35%, menjadi Rp 769,662 juta (lihat grafik 4.4).

Grafik 4.3. Trend Total Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 - 2013



Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

Grafik 4.4. Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 -2013

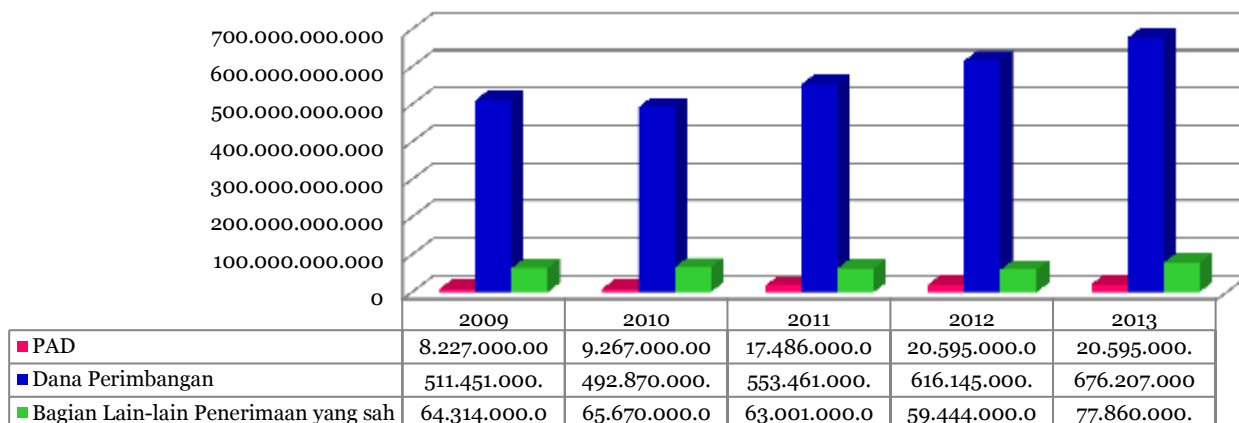


Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

4.1.2. Trend Komponen Pendapatan Daerah.

Dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan, ***dana perimbangan merupakan pos penyumbang terbesar terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat.*** Sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik 4.5 berikut, bahwa dana perimbangan mendominasi total pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat selama periode tahun 2009 – 2013. Pada tahun 2009, kontribusi pos dana ini terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat mencapai 87,60%. Hingga tahun 2013, meskipun persentasenya mengalami penurunan seiring dengan mulai meningkatnya pendapatan daerah pada pos lain-lain penerimaan yang sah, namun kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat tetap mencapai lebih dari 80.0% (lihat grafik 4.6).

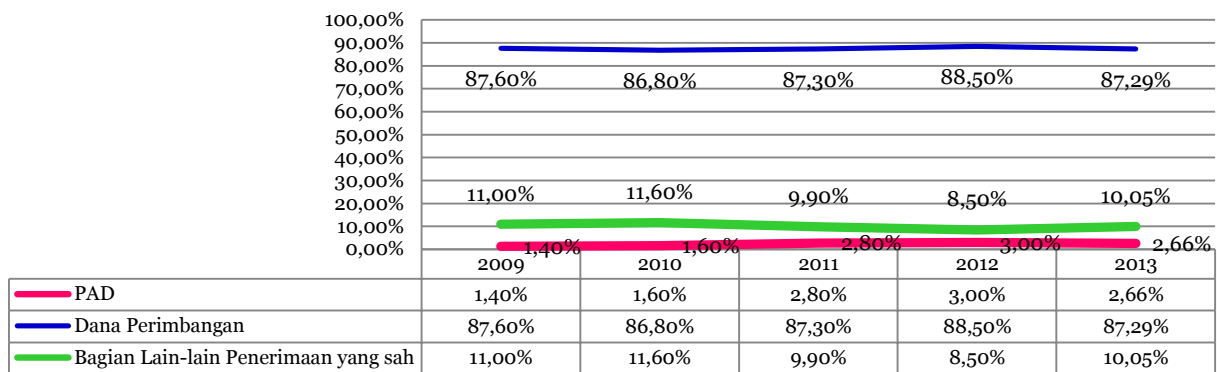
Grafik 4.5 Trend Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 - 2013



Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

Kondisi di atas mengindikasikan masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terhadap Pemerintah Pusat, dalam segi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Grafik 4.6. Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah terhadap APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 - 2013

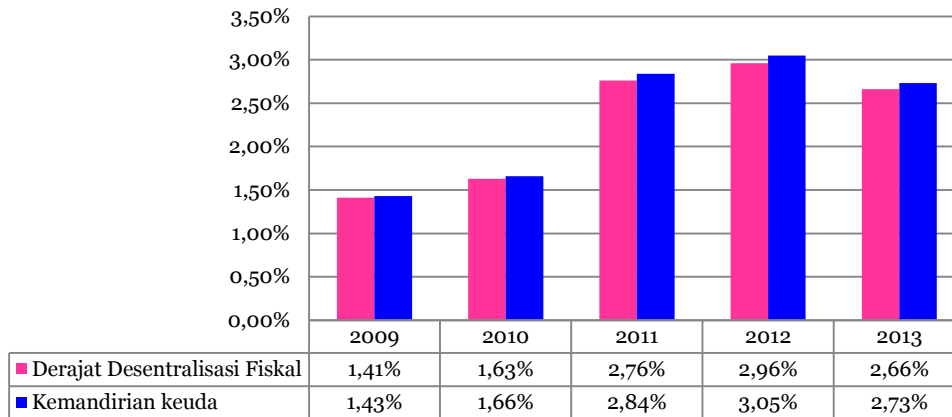


Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

Grafik 4.7 berikut menunjukkan bahwa **perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Raja Ampat, selama 5 tahun terakhir, tergolong rendah; rata-rata hanya sebesar 2,28%**. Artinya, tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terhadap Pemerintah Pusat, memang, cukup tinggi. Hal itu, antara lain, disebabkan karena belum optimalnya penerimaan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

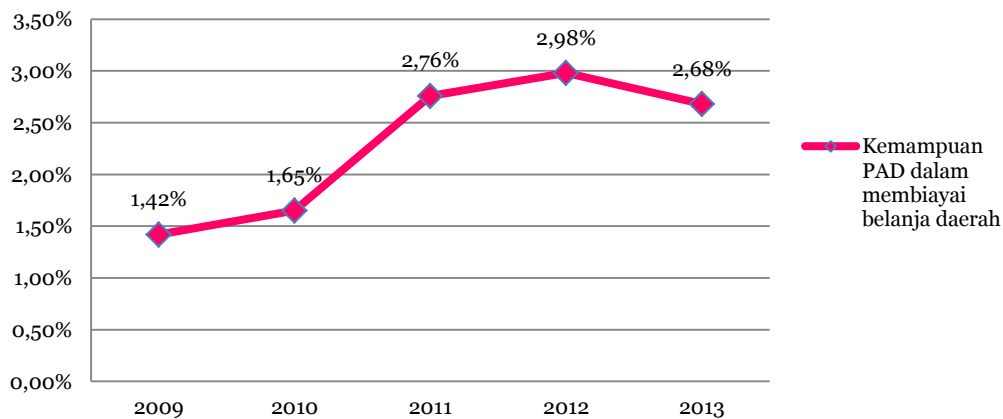
Seperti yang terlihat grafik 4.8 berikut, bahwa **kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah tergolong lemah**. Selama tahun 2009 – 2013, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Raja Ampat rata-rata hanya sebesar **2,30%**. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat belum serius dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber PAD.

Grafik 4.7. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 - 2013



Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

Grafik 4.8. Kemampuan PAD Membiayai Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 - 2013



Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

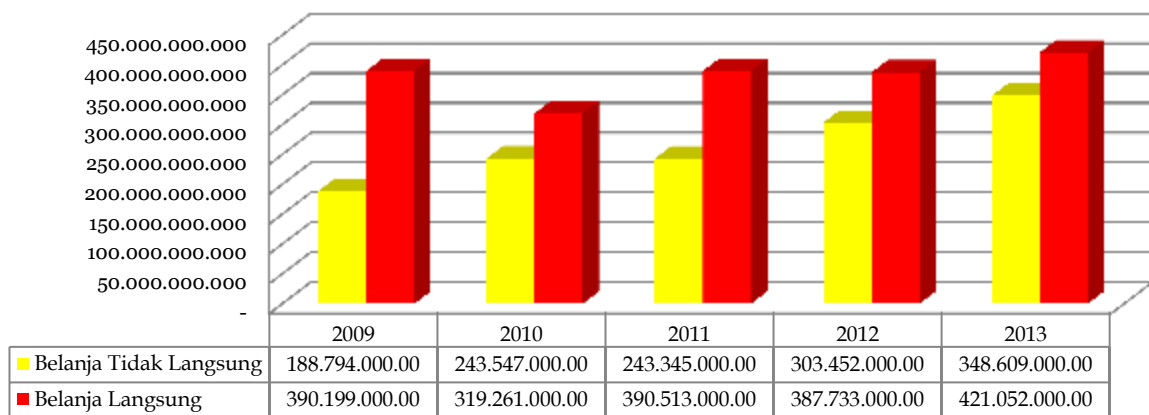
4.1.3. Trend Komponen Belanja Daerah.

Kebijakan belanja daerah dalam kerangka APBD Kabupaten Raja Ampat merupakan cerminan dari Rencana Strategis Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 – 2015, di mana kebijakan yang ditetapkan, diharapkan mampu menjadi jawaban untuk menyelesaikan, atau paling tidak, meminimalkan permasalahan yang ada, dalam wujud program pembangunan yang strategis. Dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015, Kabupaten Raja Ampat menentukan prioritas belanja daerah pada aktivitas pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan ketersediaan dan akses

pelayanan publik, perbaikan tatakelola pemerintahan, dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan prioritas belanja daerah seperti disebutkan di atas, komposisi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada komponen belanja daerah Kabupaten Raja Ampat periode tahun 2009 – 2013 menunjukkan trend sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik 4.9 berikut.

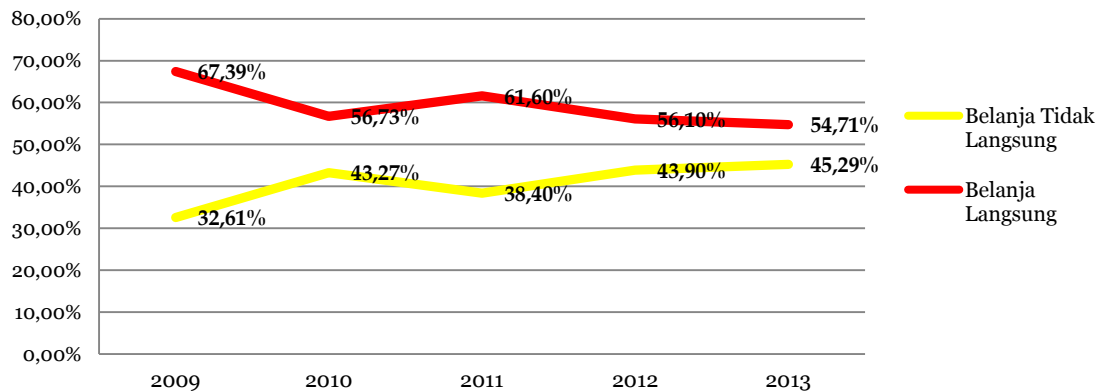
Grafik 4.9. Trend Komponen Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 - 2013



Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

Grafik di atas menjelaskan bahwa untuk komposisi belanja daerah, **selama tahun 2009 – 2013, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk porsi belanja langsung, daripada belanja tidak langsung**. Hal ini patut mendapat apresiasi karena dengan komposisi belanja daerah yang demikian, mengindikasikan semakin meningkatnya kinerja anggaran pemerintah serta memberikan harapan yang lebih besar terhadap meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat.

Grafik 4.10. Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 - 2013

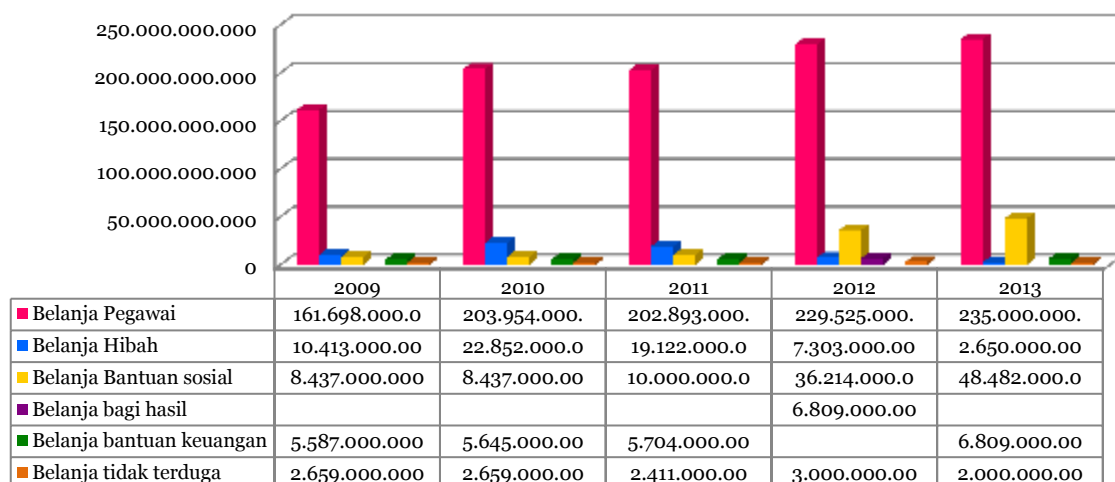


Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

4.1.4. Trend Komponen Belanja Tidak Langsung.

Seperti yang terlihat pada grafik 4.11 berikut, bahwa **dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013, komponen belanja tidak langsung pada pos belanja daerah Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh jenis belanja pegawai**. Porsi belanja yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta belanja aparatur lainnya, ini mencapai lebih dari 30,0% dari total belanja daerah, setiap tahun.

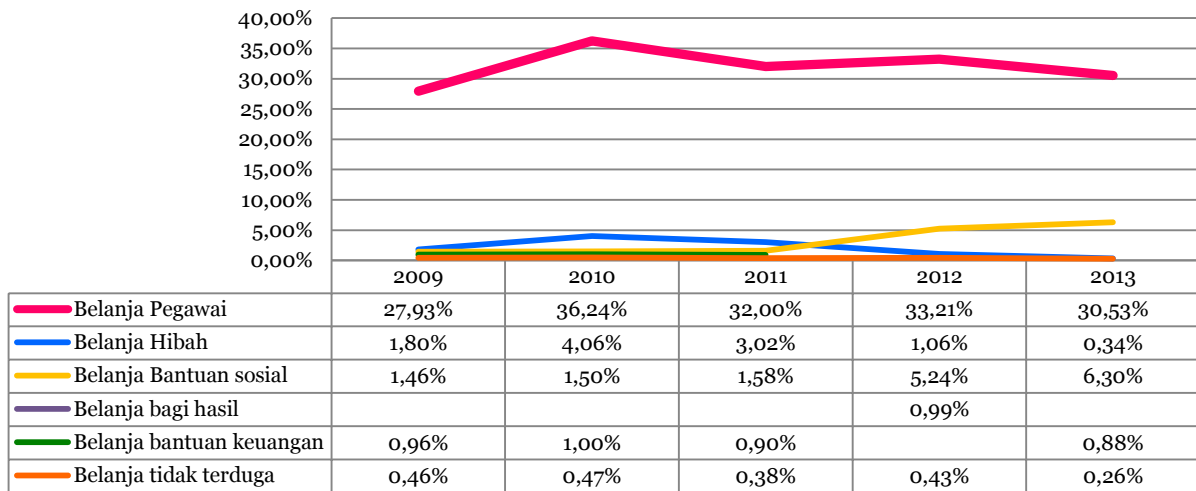
Grafik 4.11. Trend Komponen Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 - 2013



Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

Sementara itu, untuk jenis *belanja hibah* dan *belanja bantuan sosial*, rata-rata mendapatkan porsi yang hampir sama, yakni berkisar antara 1 – 6,30%, setiap tahun. Sedangkan, untuk jenis *belanja bagi hasil*, *belanja bantuan keuangan*, dan *belanja tidak terduga*, rata-rata mendapatkan porsi yang kurang dari 1,0%, setiap tahunnya.

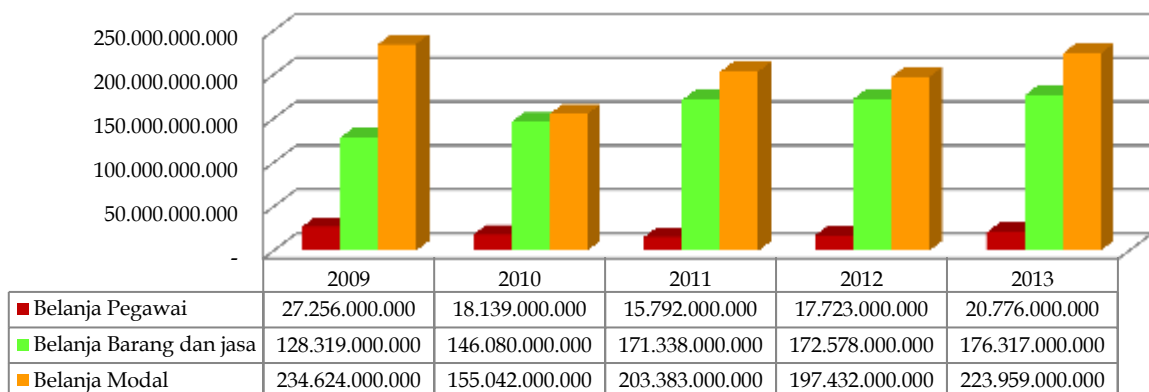
Grafik 4.12. Pertumbuhan Komponen Belanja Tidak Langsung Pemerintah kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 -2013



4.1.5. Trend Komponen Belanja Langsung.

Dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013, komponen belanja langsung pada pos belanja daerah Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh jenis belanja modal, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar (lihat grafik 4.13).

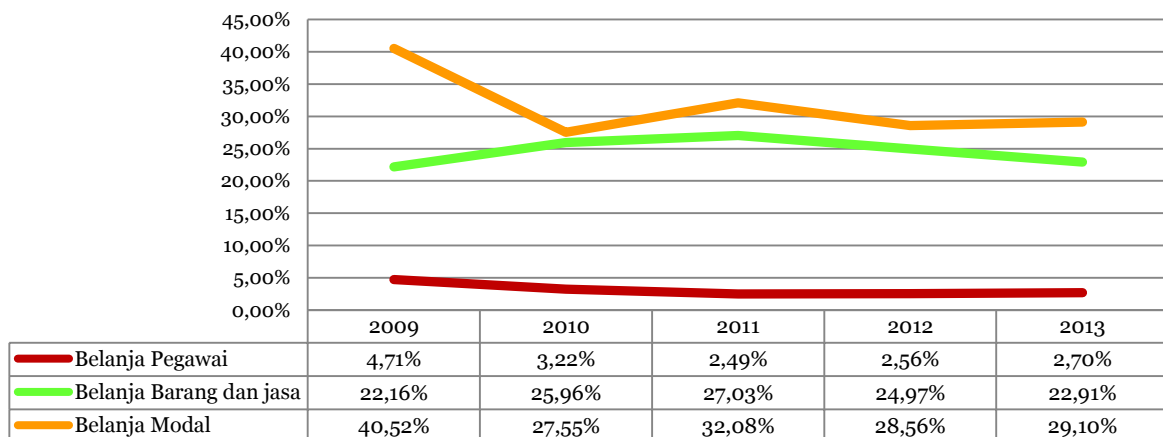
Grafik 4.13. Trend Komponen Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 - 2013



Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

Sementara, untuk jenis *belanja barang dan jasa*, yakni belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, mendapatkan porsi rata-rata sebesar 24,60%. Sedangkan, porsi untuk jenis *belanja pegawai*, rata-rata sebesar 3,14% (lihat grafik 4.14).

Grafik 4.14. Pertumbuhan Komponen Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 - 2013



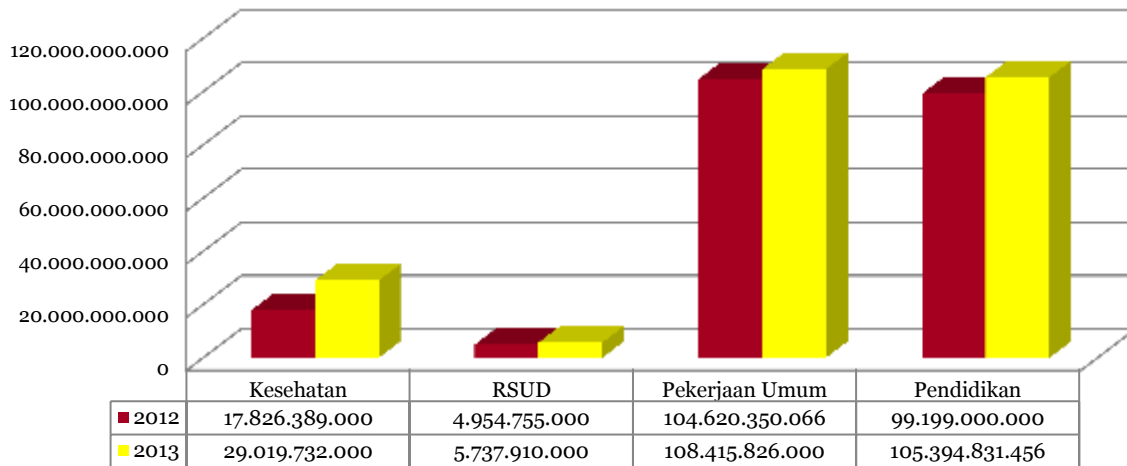
Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2009 – 2013, *diolah*.

4.1.6. Trend Belanja Berdasarkan Urusan.

Sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik 4.15 berikut, bahwa untuk alokasi belanja berdasarkan urusan, ***dalam dua tahun terakhir (2012 dan 2013), porsi belanja APBD terbesar dialokasikan untuk belanja urusan pekerjaan umum***. Kemudian, diikuti oleh belanja urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan, dan belanja urusan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pada tahun 2012, porsi belanja urusan pendidikan Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar Rp 99,199 juta atau sekitar 14,3% dari total belanja APBD. Di tahun 2013, porsi belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,24%, menjadi Rp 105.394 juta sekitar 13,6% dari total belanja APBD. Meskipun, secara nominal, porsi belanja tersebut, memang, mengalami kenaikan sebesar Rp 6,195 juta, namun bila dibandingkan dengan total belanja APBD tahun 2013, yang mencapai Rp 762,992 juta, maka sebenarnya, ***porsi belanja urusan pendidikan Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan sebesar 0,7%***.

Grafik 4.15. Trend Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat 2012-2013



Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2012 dan 2013, *diolah*.

Dengan alokasi anggaran pendidikan seperti tersebut di atas, dapat dikemukakan pula bahwa ***dalam dua tahun terakhir, alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Raja Ampat belum memenuhi amanat amandemen pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945***, yang menyebutkan bahwa dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari APBN/ APBD.

Hal lain yang juga dapat dikemukakan dari grafik 4.15, bahwa ***dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengalokasikan anggaran untuk belanja urusan kesehatan yang jauh lebih kecil, dibandingkan porsi belanja urusan pekerjaan umum dan urusan pendidikan***. Sekalipun, porsi belanja urusan kesehatan itu digabungkan dengan porsi belanja RSUD, namun tetap saja jumlahnya tidak mencapai separuh dari porsi belanja, baik untuk urusan pekerjaan umum maupun urusan pendidikan.

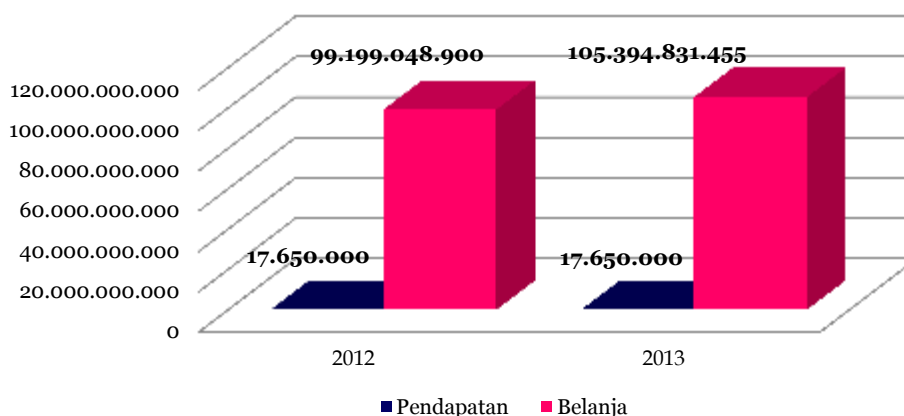
Dua hal terakhir di atas mengindikasikan adanya ***inkonsistensi*** antara perencanaan, di satu pihak; sebagaimana yang termuat dalam Visi dan Misi Kabuapten Raja Ampat tahun 2011 – 2015, dengan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan dan kesehatan, di pihak yang lain. Seharusnya, urusan yang menjadi prioritas daerah, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, mendapat porsi yang lebih, dibandingkan urusan yang tidak menjadi prioritas daerah. Oleh karena itu, patut dipertanyakan, apakah yang menjadi dasar kebijakan pengalokasian anggaran seperti tersebut di atas?

4.2. Potret Anggaran Pendidikan Tahun 2012 - 2013.

4.2.1. Trend Total Pendapatan dan Belanja Pendidikan.

Berbeda dengan komposisi belanja daerah secara umum; di mana, porsi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung, pada belanja urusan pendidikan, terjadi sebaliknya. Dalam dua tahun terakhir, trend belanja pendidikan Kabupaten Raja Ampat menunjukkan kecenderungan **“peningkatan pada belanja tidak langsung dan penurunan belanja langsung.”**

Grafik 4.16. Trend Total Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 - 2013

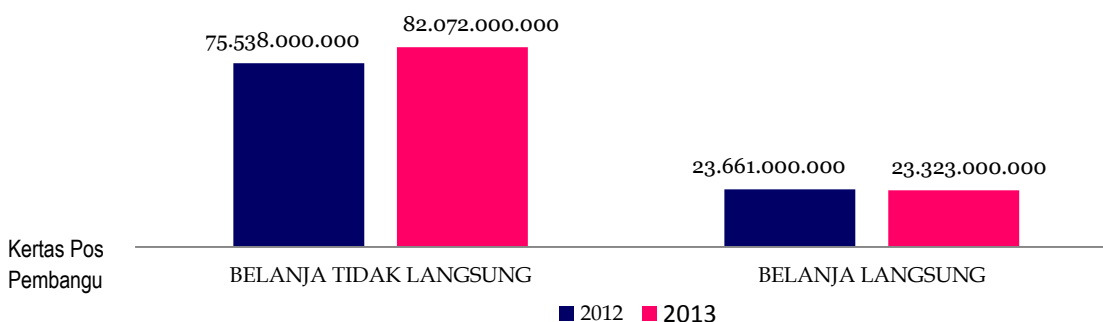


Sumber: APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2012 dan 2013, *diolah*.

Seperti yang terlihat pada grafik 4.17 berikut, bahwa pada tahun 2012, alokasi belanja tidak langsung pada pos belanja pendidikan Kabupaten Raja Ampat mencapai Rp 75,538 juta (76,2%). Di tahun 2013, alokasi belanja yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS/ guru dan tenaga pendidik itu, mengalami kenaikan sebesar 8,64%, menjadi Rp 82,072 juta atau sekitar 77,87% dari total belanja pendidikan Kabupaten Raja Ampat.

Sementara itu, untuk porsi belanja langsung, pada tahun 2012, dialokasikan sebesar Rp 23,661 juta (23,8%). Di tahun 2013, porsi belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan ini, mengalami penurunan sekitar 1,42%, menjadi Rp 23,323 juta atau sekitar 22,13% dari total belanja pendidikan Kabupaten Raja Ampat.

Grafik 4.17. Trend Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 - 2013

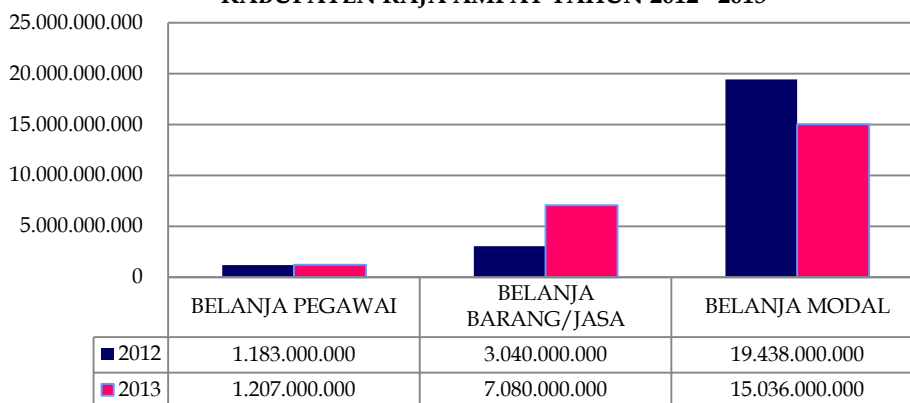


Sumber: APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2012 dan 2013, **diolah**.

Pada kelompok belanja langsung sendiri, porsi terbesar dialokasikan untuk jenis belanja modal, yang pada tahun 2012, nominalnya mencapai Rp 19,438 juta atau sekitar 82,2% dari total belanja langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat, saat itu. Sedangkan, untuk belanja barang dan jasa dan belanja pegawai, masing-masing, mendapatkan porsi sebesar Rp 3,000 juta (12,8%) dan Rp 1,183 juta (5,00%).

Di tahun 2013, porsi belanja modal mengalami penurunan sekitar 22,6%, menjadi Rp 15,036 juta. Sebaliknya, porsi belanja barang dan jasa mengalami kenaikan yang sangat drastis, mencapai 132,90%, yaitu menjadi Rp 7,080 juta. Demikian halnya dengan porsi belanja pegawai, yang juga mengalami kenaikan sekitar 2,02%, menjadi Rp 1,207 juta (lihat grafik 4.15).

Grafik 4.15. TREND BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2012 - 2013



Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2012 dan 2013, **diolah**.

4.2.2. Trend Belanja Program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengalokasikan anggaran pendidikan untuk pelaksanaan 6 (enam) program, sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Kantor;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Penyediaan Sarana Penunjang, Sarana Pendukung, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar;
- Program Penyediaan Sarana Penunjang, Sarana Pendukung, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah;
- Program Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Penyediaan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi; dan

f. Program Pendidikan Luar Sekolah.

Dari keenam program tersebut di atas, hanya terdapat 1 (satu) buah program yang berkaitan langsung dengan pembangunan pendidikan dasar, yaitu **“Program Penyediaan Sarana Penunjang, Sarana Pendukung, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.”** Meskipun hanya satu, namun porsi anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai lebih separuh (50,7%) dari total belanja langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat tahun 2012. Hal itu, disebabkan karena alokasi anggaran untuk program tersebut merupakan penggabungan dari porsi anggaran untuk program pendidikan dasar (SD) dan pendidikan menengah pertama (SMP).

**Tabel 4.2. Belanja Program pada Belanja Langsung
Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 – 2013**

Program	2012	(%)	2013	(%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,762,602,000	7,45	1,775,000,000	7,6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	620,000,000	2,65		
Program Penyediaan Sarana Penunjang, Sarana Pendukung, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	11,990,668,000	50,7	6,619,336,100	28,4
Program Penyediaan Sarana Penunjang, Sarana Pendukung dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah	6,487,632,000	27,4	4,360,410,900	18,7
Program Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana/Prasarana Penunjang Pendukung Pendidikan Menengah Atas			8,911,610,000	38,2
Program Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Penyediaan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Raja Ampat	2,600,000,000	11,0		
Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah di Kab. Raja Ampat	200,000,000	0,8		
Program Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/Prasarana Penunjang/ Pendukung Pendidikan Tinggi			1,106,400,000	4,8
Program Peningkatan Kuantitas			125,000,000	0,5

dan Kualitas Sarana Penunjang/ Pendukung Bidang Kebudayaan				
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Penunjang/ Pendukung Pendidikan Non Formal			425,000,000	1,8
TOTAL BELANJA LANGSUNG	23,660,902,000	100,00	23,322,757,000	100,00

Sumber : APBD Kab. Raja Ampat Tahun 2012 dan 2013, *diolah*.

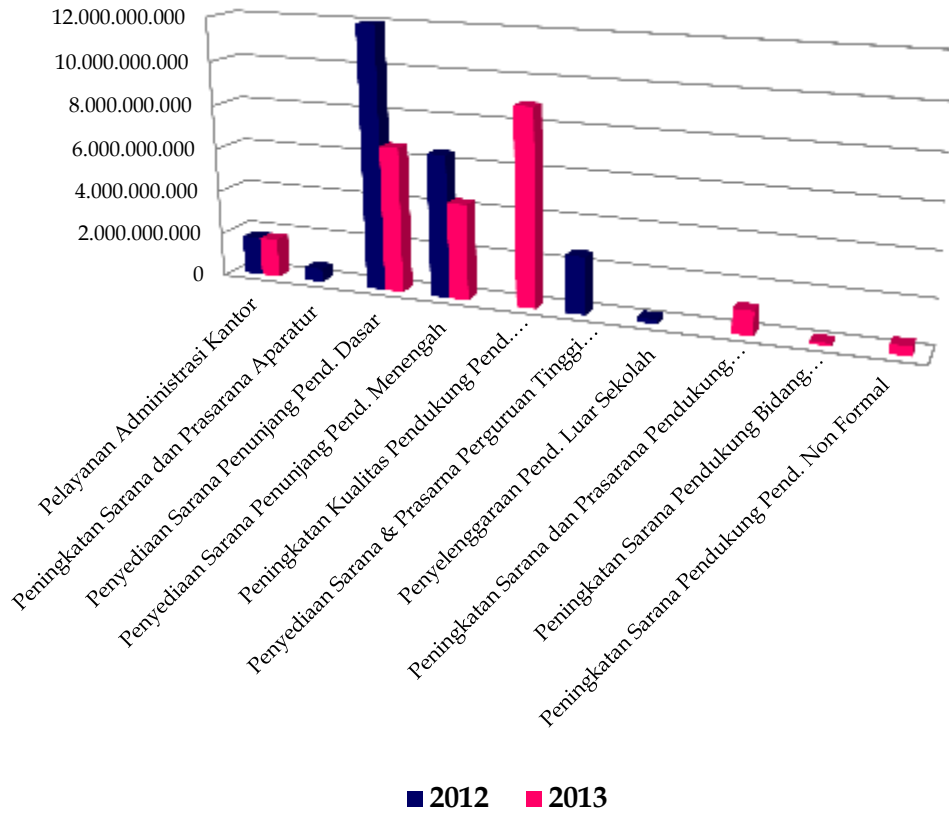
Pada tahun 2013, alokasi belanja langsung urusan pendidikan Kabupaten Raja Ampat diarahkan untuk pelaksanaan 7 (tujuh) program, sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Kantor;
- Program Penyediaan Sarana Penunjang, Sarana Pendukung, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar;
- Program Penyediaan Sarana Penunjang, Sarana Pendukung, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah;
- Program Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana/Prasarana Penunjang Pendukung Pendidikan Menengah Atas;
- Program Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/Prasarana Penunjang/ Pendukung Pendidikan Tinggi;
- Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Penunjang/Pendukung Bidang Kebudayaan; dan
- Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Penunjang/ Pendukung Pendidikan Non Formal.

Dengan demikian, pada tahun 2013, Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat mengurangi sebanyak 3 (tiga) program lama yang terdapat di tahun 2012, dan menambah 4 (empat) program baru.

Dari ketujuh program tersebut di atas, terdapat 2 (dua) buah program yang berkaitan langsung dengan pembangunan pendidikan dasar, yaitu : **(1) Program Penyediaan Sarana Penunjang, Sarana Pendukung, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar**, dan **(2) Program Penyediaan Sarana Penunjang, Sarana Pendukung, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah**. Porsi anggaran yang dialokasikan untuk kedua program di atas, masing-masing, sebesar Rp 6,620 juta (28,4%) untuk pendidikan dasar dan Rp 4,360 juta (18,7%) untuk pendidikan menengah.

Grafik 4.16. TREND BELANJA PROGRAM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2012 - 2013



4.2.3. Analisis.

Seperti yang telah disebutkan di muka, bahwa salah satu isu pendidikan yang hendak disoroti dalam *paper* ini adalah terkait dengan **“rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Raja Ampat.”**

- Bahwa di Kabupaten Raja Ampat **masih terdapat sekitar 11.615 penduduk yang tingkat pendidikannya hanya sampai tamat SD**; bahkan, **yang tidak memiliki ijazah mencapai lebih dari 10.000 penduduk.**
- Bahwa di antara penduduk Kabupaten Raja Ampat yang berusia 10 tahun ke atas (31.556 jiwa), **36,81% di antaranya hanya tamat SD**, 18,83% tamat SMP, 9,63% tamat SMA, 2,84% tamat Perguruan Tinggi, dan **sekitar 31,89% tidak memiliki ijazah**; bahkan, **6,02% di antaranya (1.899 jiwa) buta huruf.**

Terkait dengan isu tersebut di atas, dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Analisis Pertumbuhan Anggaran.

Rumus :

$$(T_2 - T_1)/T_1 \times 100$$

Ket. :

T₂ adalah anggaran pendidikan Kabupaten Raja Ampat tahun terakhir (2013); dan

T₁ adalah anggaran pendidikan Kabupaten Raja Ampat tahun sebelumnya (2012).

$$(Rp 105.394 \text{ juta} - Rp 99.199 \text{ juta}) / Rp 99.199 \text{ juta} \times 100$$

$$= Rp 6.195 \text{ juta} / Rp 99.199 \text{ juta} \times 100$$

$$= \underline{\underline{6,24\%}}$$

Artinya, *alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 6,24%.*

Meskipun demikian, seperti yang telah disebutkan pada halaman 24 di atas, bahwa walaupun secara nominal, alokasi anggaran pendidikan tersebut, memang, mengalami kenaikan sebesar Rp 6,195 juta, namun bila dibandingkan dengan total belanja APBD tahun 2013, yang mencapai Rp 762,992 juta, maka sesungguhnya, alokasi anggaran pendidikan itu mengalami penurunan sebesar :

$$14,3\% - 13,6\% = \underline{\underline{0,7\%}}$$

Persoalan penurunan porsi anggaran pendidikan di atas harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, karena dengan terjadinya penurunan porsi

anggaran tersebut menunjukkan belum adanya skema perencanaan kebijakan pendidikan yang jelas, yang sesuai dengan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Raja Ampat tahun 2011 – 2015.

2. Analisis Proporsi.

Rumus :

PersentaseShare(Proporsi) = Bagian/Total x 100

Porsi anggaran untuk Program Penyediaan Sarana Penunjang, Sarana Pendukung, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar adalah sebesar **Rp 6,620 juta**. Sedangkan, porsi anggaran untuk Program Penyediaan Sarana Penunjang, Sarana Pendukung, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah adalah sebesar **Rp 4,360 juta**.

Jika porsi anggaran untuk kedua program tersebut di atas (Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun) dijumlahkan, maka totalnya adalah sebesar **Rp 10,980 juta**.

$$\text{Rp } 10,980 \text{ juta} / \text{Rp } 105,394 \text{ juta} \times 100 \\ = \underline{\underline{10,41\%}}$$

Artinya, *porsi anggaran yang dialokasikan untuk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun hanyalah sebesar 10,41% dari total anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat tahun 2013.*

Porsi anggaran yang demikian tentunya sangat berpengaruh terhadap upaya pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Raja Ampat. Dengan porsi anggaran yang hanya sebesar 10,41% dari total anggaran pendidikan Kabupaten Raja Ampat tahun 2013, jelas tidak sebanding dengan upaya penyelesaian/ pemecahan permasalahan pendidikan dasar seperti di sebutkan di atas.

3. Analisis Per Kapita.

Rumus :

Jumlah anggaran/ jumlah populasi

Ket.

Porsi anggaran untuk urusan pendidikan = Rp 105,394 juta.

Jumlah penduduk usia 5 – 9 tahun = 5.592 jiwa

Jumlah penduduk usia 10 – 14 tahun = 4.431 jiwa

Jumlah penduduk usia 15 – 19 tahun = 3.811 jiwa

Jumlah penduduk usia 20 – 24 tahun = 4.012 jiwa

Total = 17.846 jiwa

Rp 105,394 juta/ 17.846 jiwa
= **Rp 5.905.750,-**

Artinya, porsi anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk 1 (satu) orang penduduk usia sekolah di Kabupaten Raja Ampat, adalah sebesar Rp 5.905.750,-.

Porsi anggaran seperti disebutkan di atas, sebenarnya, sudah cukup besar, jika tidak dikikis oleh belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS/ guru dan tenaga pendidik. Namun, pada kenyataannya, komposisi belanja pada anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 menunjukkan bahwa porsi belanja tidak langsung lebih besar (77,87%) daripada belanja langsung (22,13%).

4. Analisis Efisiensi.

Rumus :

Persentase realisasi = aktual/rencana x 100

Tabel 4.3. Persentase Realisasi Anggaran Pendidikan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 – 2012

No	Tahun	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%) (d)/ (c) X 100
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	2009	92.881.000.000	7.289.939.357	7,8
2	2010	88.712.000.000	82.312.000.000	92,78
3	2011	99.180.598.955	90.253.749.273	90,9
4	2012	115.287.000.dari000	109.042.000.000	94,58

Dari perhitungan pada tabel 4.3, di atas, dapat disebutkan bahwa persentase realisasi anggaran pendidikan Kabupaten Raja Ampat tahun :

2009 sebesar **7,8%**;
2010 sebesar **92,78%**;
2011 sebesar **90,9%**; dan
2012 sebesar **94,58%**.

5. Analisis Kecukupan Alokasi Anggaran.

Terkait dengan isu rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Raja Ampat di atas, maka salah satu program yang tampaknya dapat mengurangi jumlah penduduk yang buta huruf (sekitar 1.899 jiwa) atau pun yang tingkat pendidikannya hanya

sampai tamat SD (11.615 jiwa), adalah **Program Pendidikan Kesetaraan Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SMP)**.

Di dalam dokumen APBD Kabupaten Raja Ampat tahun 2013, program di atas menjadi salah satu sub-program atau kegiatan dari *Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Penunjang/ Pendukung Bidang Kebudayaan* dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 75.000.000,-**.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang akan diikuti dalam program tersebut, yaitu sebanyak 1.899 jiwa untuk Paket A dan 11.615 jiwa untuk paket B, maka jumlah anggaran yang dialokasikan seperti disebutkan di atas, sangatlah tidak mencukupi.

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 75.000.000,- / (1.899 \text{ jiwa} + 11.615) \\ & = \text{Rp } 75.000.000,- / 13.514 \text{ jiwa} \\ & = \text{Rp } \underline{\underline{5.549,-}} \end{aligned}$$

BAGIAN 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : *pertama*, bahwa salah satu isu pendidikan yang wajib mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat; khususnya, SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat, adalah terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Raja Ampat.

Kedua, meskipun data statistik menyebutkan bahwa di Kabupaten Raja Ampat, angka rasio murid terhadap sekolah dan rasio murid terhadap guru pada jenjang pendidikan SD dan SMP sudah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan berdasarkan PERMENDIKNAS nomor 15 tahun 2010, namun pada kenyataannya, di Kabupaten Raja Ampat masih terdapat sekitar 11.615 penduduk yang tingkat pendidikannya hanya sampai tamat SD; bahkan, yang tidak memiliki ijazah mencapai lebih dari 10.000 penduduk.

Ketiga, meskipun secara statistik, angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Raja Ampat sudah mendekati standar APS, APK, dan APM nasional, namun pada kenyataannya, di antara penduduk Kabupaten Raja Ampat yang berusia 10 tahun ke atas (31.556 jiwa), terdapat 6,02% (1.899) penduduk buta huruf.

Keempat, bahwa trend total pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Dana perimbangan merupakan pos penyumbang terbesar terhadap total pendaatan daerah tersebut di atas; di mana, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2009 – 2013), kontribusinya mencapai lebih dari 80,0%, setiap tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terhadap Pemerintah Pusat, dalam segi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Kelima, tingginya tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat di atas, juga dapat dilihat dari :

- a. Perkembangan kemampuan keuangan daerah yang tergolong rendah; rata-rata hanya sebesar 2,8%; dan
- b. Lemahnya kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah; di mana, rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata hanya sebesar 2,30%.

Keenam, bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2009 - 2013), komposisi belanja daerah Kabupaten Raja Ampat menunjukkan porsi yang lebih besar untuk belanja langsung, daripada belanja tidak langsung. Komponen belanja tidak langsung didominasi oleh jenis belanja pegawai, yang porsinya mencapai lebih dari 30,0%, setiap tahun. Sedangkan, untuk komponen belanja langsung, didominasi oleh jenis belanja modal; terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Ketujuh, untuk alokasi belanja berdasarkan urusan pemerintah, dalam dua tahun terakhir (2012 dan 2013), porsi belanja APBD terbesar dialokasikan untuk belanja urusan pekerjaan umum. Kemudian, diikuti oleh belanja urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan, dan belanja urusan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Kedelapan, bahwa dalam dua tahun terakhir, alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Raja Ampat belum memenuhi amanat amandemen pasal 31 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari APBN/ APBD. Hal ini mengindikasikan adanya *inkonsistensi* antara perencanaan, di satu pihak; sebagaimana yang termuat dalam Visi dan Misi Kabuapten Raja Ampat tahun 2011 – 2015, dengan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan, di pihak yang lain.

Kesembilan, berbeda dengan komposisi belanja daerah secara umum; di mana, porsi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung, pada belanja urusan pendidikan, terjadi sebaliknya. Dalam dua tahun terakhir, trend belanja pendidikan Kabupaten Raja Ampat menunjukkan kecenderungan “*peningkatan pada belanja tidak langsung dan penurunan belanja langsung.*”

Kesepuluh, meskipun pada tahun 2013, alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 6,24%, namun bila dibandingkan dengan total belanja APBD tahun 2013, yang mencapai Rp 762,992 juta, maka sesungguhnya, alokasi anggaran pendidikan itu mengalami penurunan sebesar : 0,7%. Persoalan penurunan porsi



anggaran pendidikan di atas harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, karena dengan terjadinya penurunan porsi anggaran tersebut menunjukkan belum adanya skema perencanaan kebijakan pendidikan yang jelas, yang sesuai dengan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Raja Ampat tahun 2011 – 2015.

Kesebelas, porsi anggaran yang dialokasikan untuk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun hanyalah sebesar 10,41% dari total anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat tahun 2013. Porsi anggaran yang demikian tentunya sangat berpengaruh terhadap upaya pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Raja Ampat. Dengan porsi anggaran yang hanya sebesar 10,41% dari total anggaran pendidikan Kabupaten Raja Ampat tahun 2013, jelas tidak sebanding dengan upaya penyelesaian/ pemecahan permasalahan pendidikan dasar seperti di sebutkan di atas.

Keduabelas, porsi anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk 1 (satu) orang penduduk usia sekolah di Kabupaten Raja Ampat, adalah sebesar Rp 5.905.750,-. Porsi anggaran seperti disebutkan di atas, sebenarnya, sudah cukup besar, jika tidak dikikis oleh belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS/ guru dan tenaga pendidik. Namun, pada kenyataannya, komposisi belanja pada anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 menunjukkan bahwa porsi belanja tidak langsung lebih besar (77,87%) daripada belanja langsung (22,13%).

Ketigabelas, persentase realisasi anggaran pendidikan Kabupaten Raja Ampat tahun 2009 adalah sebesar 7,8%; tahun 2010 sebesar 92,78%; tahun 2011 sebesar 90,9%; dan tahun 2012 sebesar 94,58%.

Keempatbelas, porsi anggaran sebesar Rp 75.000.000,- yang dialokasikan untuk Program Ujian Paket A dan Paket B, sebagai salah satu alternatif program untuk mengurangi jumlah penduduk yang buta huruf dan yang tingkat pendidikannya hanya sampai tamat SD, sangatlah tidak mencukupi, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang akan diikuti sertakan dalam program tersebut.

Kelimabelas, secara umum, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat belum memberikan perhatian serius terhadap salah satu isu pendidikan yang selama ini berkembang, yaitu terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Raja Ampat.

5.2. Sikap dan Posisi WAPARASI Raja Ampat.

1. Mendorong peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kredibilitas aparat Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*);



PATTIRO

PUSAT TELAHAH DAN INFORMASI REGIONAL
(CENTER FOR REGIONAL INFORMATION AND STUDIES)

Warung Kopi
Aspirasi untuk Transparansi
(WAPARASI) Raja Ampat

2. Mendorong perbaikan management/ pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik; dan
3. Mendorong penambahan alokasi anggaran pendidikan hingga mencapai 20% dari total APBD Kabupaten Raja Ampat agar sesuai dengan amanat konstitusi.

5.3. Rekomendasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil “WAPARASI” (Warung Kopi Aspirasi untuk Transparansi) Raja Ampat merekomendasikan :

1. Mendorong perbaikan management/ pengelolaan anggaran pendidikan Kabupaten Raja Ampat agar tidak terdapat kesenjangan yang mencolok antara belanja tidak langsung dan belanja langsung;
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, khususnya SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat untuk mengurangi porsi anggaran kegiatan yang tidak berkaitan dengan upaya pembangunan pendidikan; sebaaimana yang banyak termuat dalam dokumen APBD Kabupaten Raja Ampat;
3. Mengusulkan agar **Program Pendidikan Kesetaraan – Paket A (setara SD) dan Pakaet B (setara SMP)** dimasukkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2014, sebagai salah satu alternatif pemecahan permasalahan pendidikan yang terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Raja Ampat.